

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kontingensi

Teori kontingensi pertama kali diperkenalkan oleh Fred Fiedler. Ia mengembangkan ***Fiedler Contingency Theory*** pada pertengahan tahun 1960-an yang isinya membahas mengenai teori kontingensi dalam konteks manajemen dan organisasi. Fiedler menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan seorang pemimpin dan situasi di mana ia bekerja. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada konteks atau situasi, seperti struktur tugas, hubungan pemimpin-anggota, dan kekuasaan pemimpin.

Teori ini kemudian dikembangkan di berbagai aspek dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Salah satunya dalam penerapan sistem pengendalian internal piutang pada perusahaan. Teori kontingensi menyatakan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan bergantung pada konteks dan situasi, bukan pendekatan yang seragam. Oleh karena itu, pemimpin yang baik harus tetap fleksibel dan menyesuaikan pendekatannya sesuai kebutuhan (Villoria, 2022; Shenkar & Ellis, 2022).

Selain penjelasan tersebut, juga terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori kontingensi, sebagai berikut:

- a. Menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorsch, mereka berpendapat bahwa struktur organisasi dan gaya manajerial harus disesuaikan dengan lingkungan eksternal dan kondisi internal yang dihadapi oleh organisasi. Konsep ini kemudian diterapkan dalam pengendalian internal, yang menekankan bahwa sistem pengendalian internal harus disesuaikan dengan kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan serta strategi perusahaan.
- b. Menurut Simons (1995) menyatakan bahwa organisasi harus menggunakan empat sistem pengendalian utama (*belief systems, boundary systems, diagnostic control systems, dan interactive control systems*), dan penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks organisasi. Sistem pengendalian internal harus disesuaikan untuk menyeimbangkan inovasi dan kontrol, tergantung situasi organisasi.
- c. Menurut Robert Anthony dalam bukunya "*Planning and Control in Organizations*" tahun 1965, memperkenalkan teori kontingensi dalam konteks pengendalian manajemen. Teori ini menyatakan bahwa desain dan penggunaan sistem pengendalian manajemen seharusnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi organisasi, bukan berdasarkan satu pendekatan universal.

Teori kontingensi pengendalian internal secara umum menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung kepada kesesuaian karakteristik perusahaan seperti struktur, kondisi perusahaan, lingkungan, ukuran perusahaan, terhadap strategi. Kesesuaian karakteristik ini dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Teori kontingensi dalam konteks sistem pengendalian internal menjelaskan bahwa tidak ada satu sistem pengendalian yang paling efektif untuk semua organisasi.

Penerapan teori kontingensi pada pengendalian internal berdampak pada meningkatnya efektivitas dan fleksibilitas dalam perusahaan, serta penghematan biaya. Karena sistem pengendalian disesuaikan dengan kondisi spesifik dan efektif dalam mengurangi risiko dan mencapai tujuan perusahaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dapat mengurangi pemborosan biaya.

2. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal perusahaan yang efektif merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal perusahaan yang efektif dapat membantu manajemen perusahaan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar,

lengkap, dan tepat waktu serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.

Sistem pengendalian internal diartikan sebagai sistem yang digunakan perusahaan untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan pengendalian internal dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Salasa, dkk, 2016).

Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan (Yustania, 2024).

Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014), pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses atau prosedur yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama pengendalian internal piutang usaha adalah untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Pengendalian ini juga bertujuan untuk mencegah penipuan, kesalahan, dan hilangnya aset terkait piutang.

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000) dalam R. Sianturi (2014), Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap bank melakukan suatu kontrol yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016) terbagi atas dua yaitu: 1) Menjaga kekayaan perusahaan Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian internal adalah memastikan bahwa suatu perusahaan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Salah satu sistem pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan pengendalian internal adalah dari COSO. COSO menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan (Anastasia dan Lilis, 2010).

1) Lingkungan pengendalian.

Hal ini mencakup etika. Kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.

2) Penentuan risiko.

Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko.

3) Aktivitas pengendalian.

Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.

4) Informasi dan komunikasi.

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya.

5) Pengawasan atau pemantauan.

Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi

untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan utama dalam pengawasan meliputi supervisi yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, pengauditan internal.

Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian internal memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
Merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang telah dibentuk untuk melaksanakan aktivitas perusahaan.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan beban
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

d. Prinsip- prinsip Pengendalian Internal

Menurut Bambang Hartadi dalam (Siregar, 2019) Berikut beberapa prinsip pengendalian internal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal :

- 1) Pemisahan Fungsi Tujuan utama pemisahan fungsi yakni untuk menghindari dan mengawasi secepatnya atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi dalam pelaksanaan tugas
- 2) Prosedur Pemberian Wewenang Tujuan prinsip ini yakni untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.
- 3) Prosedur Dokumentasi Dokumen yang layak, penting guna menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.
- 4) Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Tujuan dari pengendalian ini yakni agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang kemudian dapat diteliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakannya tepat pada waktunya.
- 5) Pengawasan Fisik Berhubungan dengan penggunaan alat- alat mekanisme dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

- 6) Pemeriksaan Internal Secara Bebas Menyangkut perbandingan antara catatan aset yang betul- betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Perlu diingat bahwa sistem pengendalian intern yang terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, sistem pengendalian intern juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan yang melekat pada sistem pengendalian intern menurut Sanyoto dalam (Zulvia, 2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Persekongkolan (kolusi)

Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan dalam menjalankan tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seterusnya. Akan tetapi pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi.

- 2) Perubahan

Struktur pengendalian intern pada suatu organisasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

3) Kelemahan manusia

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena, itu personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian intern.

4) Asas biaya manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya, atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*).

f. **Pengendalian Internal atas Piutang**

Pada prinsipnya pengendalian internal harus meminimalisir serta memperbaiki masalah. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan sebagian besar aset yang dimiliki adalah berupa piutang. Agar piutang yang dimiliki perusahaan dapat terealisasi tanpa adanya atau minim penunggakan pembayaran, perusahaan perlu menetapkan kebijakan piutang yang tepat, wujud dari kebijakan tersebut yaitu dengan pengendalian internal dan pengawasan atas piutang. Maka perusahaan perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut (Hery, 2015) :

1) Penetapan pemberian kredit

Kebijakan pemberian kredit dan syarat pemberian kredit haruslah ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan perusahaan. Pada umumnya dalam pemberian kredit berpedoman pada prinsip-prinsip 5C. Seperti yang dijelaskan pula oleh (Era Trianita Saputra, 2025), yang menjelaskan bahwa Dalam proses penyaluran kredit atau pemberian piutang, perlu dilakukan analisis mendalam dengan berlandaskan pada prinsip 5C sebagai acuan penilaian terhadap perusahaan yang menjadi penerima fasilitas. Setiap unsur dalam konsep 5C tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan debitur, yang meliputi penilaian atas karakter, kapasitas, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi perusahaan penerima kredit.

a) *Character* (watak)

Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran seseorang. Watak seorang nasabah sulit ditentukan apalagi bila nasabah baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Menentukan watak seorang debitur diperlukan pencarian informasi dan penyelidikan tentang kehidupan debitur. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki watak tidak baik akan beresiko tinggi terhadap penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan pembayaran kredit tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga kredit menjadi macet atau tidak tertagih.

b) *Capital* (modal)

Seseorang yang akan mengajukan kredit untuk keperluan produktif atau konsumtif harus memiliki modal. Sebagai contoh orang yang akan mengajukan kredit untuk membeli mobil maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka merupakan modal yang dimiliki oleh debitur dan kredit yang diajukan berfungsi sebagai tambahan modal. Pemohon kredit yang berbentuk usaha, besarnya modal yang dimiliki dapat dianalisis dari laporan keuangan. Semakin besar modal yang dimiliki maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang juga baik.

c) *Capacity* (kemampuan)

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang, debitur harus memiliki kemampuan cukup yang berasal dari pendapatan. Analisa kemampuan debitur diperlukan untuk mendapatkan informasi secara benar mengenai data penghasilan atau pendapatan, sehingga memberikan keyakinan adanya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.

d) *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya maka pelunasan hutang dapat dilakukan dengan melakukan penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jenis jaminan dapat meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda yang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat immaterial misalnya jaminan pribadi dan garansi bank. Jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

e) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi Negara perlu mendapat perhatian penuh dalam proses analisa kredit. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit tersebut diberikan. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit dalam mengembalikan hutangnya dan hal ini sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan

pemohon kredit yang berdampak pada kemampuan untuk melunasi hutangnya.

Penagihan Perusahaan dapat melakukan pengendalian yang saat jatuh tempo belum melakukan pembayaran dengan dimulai dari cara pengiriman surat tagihan kepada para debitur, melalui telepon, melalui petugas yang datang ke debitur, atau melalui tindakan secara hukum.

2) Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang tepat

Dalam penetapan pengendalian internal atas piutang ini, perusahaan harus memiliki prosedur yang tepat seperti :

- a) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk piutang dagang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.
- b) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
- c) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- d) Piutang harus dicatat dalam buku tambahan piutang. Total dari saldo-saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling tidak sebulan sekali. Disamping

itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan piutang.

- e) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya.

g. Prosedur Sistem Pengendalian Internal

Prosedur pengendalian internal adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat dicapai dengan aman dan efektif, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan, penipuan, dan penyalahgunaan.

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya (Hery, 2011).

Menurut Lumempow (2016), prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:

- 1) Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
- 2) Pembagian tugas.
- 3) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
- 4) Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.

- 5) Pengecekan independen terhadap kinerja.

3. Piutang

a. Pengertian Piutang

Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain atas sejumlah uang yang harus dibayarkan dan umumnya memiliki jatuh tempo. Piutang usaha dikategorikan sebagai aset lancar dan disajikan berdasarkan nilai realisasi bersihnya (nilai piutang setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih).

Menurut Hery (2013:181) dalam praktik, piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi :

- 1) Piutang usaha adalah jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.
- 2) Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai dengan 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang.

3) Piutang lain-lain mencakup selain piutang usaha. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihan lebih dari satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak dan piutang karyawan.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan 2017 PSAK nomor 9 paragraf 07e menyatakan, menurut sumber terjadinya piutang. Piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

b. Risiko Piutang

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan pasti memiliki resiko baik yang menyebabkan kerugian maupun keuntungan bagi perusahaan dalam penerapannya, Menurut Riyanto dalam (Astuti, 2018) Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan

kepada para pelanggan. Risiko yang mungkin terjadi dalam piutang usaha, yaitu:

1) Risiko tidak dibayarnya seluruh piutang.

Bagi perusahaan merupakan risiko paling berat yang harus dihadapi, karena seluruh tagihan yang telah direncanakan akan diterima di masa yang akan datang ternyata tidak dapat diterima kembali sebagai kas, sehingga pengorbanan yang telah dilakukan terbuang percuma.

2) Risiko tidak dibayar Sebagian

Adalah risiko yang lebih ringan karena sebagian dari total piutang tersebut telah diterima perusahaan. Sering sekali terjadi dalam kasus nyata sehari-hari, seorang pembeli yang baru pertama kali mengadakan hubungan transaksi penjualan kredit akan menunjukkan kesan yang sangat baik. Namun setelah waktu untuk membayar piutangnya tiba mulailah menunjukkan itikad yang kurang baik. mereka Risiko ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, dan akan menimbulkan Kerugian jika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit.

3) Risiko keterlambatan pelunasan

Merupakan risiko yang lebih ringan tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, karena meskipun dalam waktu yang relatif tidak lama jelas terlihat bahwa pemasukan dari uang tagihan tersebut telah melewati jadwal penerimaan yang

seharusnya. Risiko ini akan menimbulkan tambahan dana perusahaan atau biaya penagihan.

4) Risiko tertanam modal perusahaan

Risiko ini terjadi karena tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja dalam piutang dan akan mengakibatkan modal kerja yang tidak produktif.

c. Ciri-Ciri Piutang Usaha

Piutang usaha memiliki beberapa ciri-ciri umum, seperti :

1) Terdapat bunga

Beberapa piutang usaha dikenakan bunga apabila pembayaran dilakukan melewati jangka waktu yang telah disepakati. Bunga ini menjadi tambahan biaya bagi debitur dan pendapatan tambahan bagi kreditur. Namun, tidak semua piutang usaha dikenakan bunga, tergantung pada kebijakan dan perjanjian bisnis.

2) Pernyataan jatuh tempo

Setiap piutang usaha memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, yaitu batas waktu terakhir dimana pembayaran harus dilakukan. Tanggal jatuh tempo ini dicantumkan dalam faktur yang diberikan kepada pelanggan, sehingga kedua belah pihak mengetahui kewajiban dan tenggat waktu pembayaran.

3) Adanya konsekuensi telat pembayaran

Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu, biasanya akan ada konsekuensi berupa penalti, denda, atau bunga tambahan. Selain itu, perusahaan juga bisa mengambil langkah hukum atau negosiasi ulang terkait pembayaran.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan memusatkan fokus penelitian tentang penerapan sistem pengendalian internal pada piutang di perusahaan untuk meminimalkan risiko piutang tidak tertagih.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

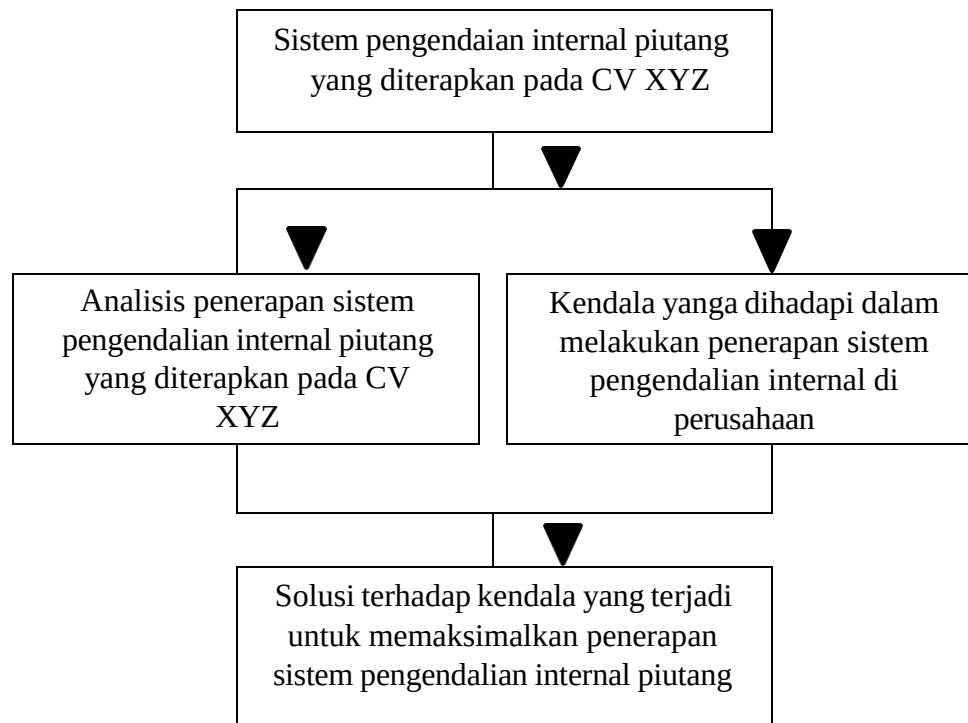
NO.	PENELITI	JUDUL	HASIL
1	Wulan Wardani (2023)	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA PT LABA INDARGO NUSANTARA	Penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT. Laba Indoagro Nusantara belum berjalan dengan baik, dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan piutang usaha pada perusahaan.

2	Yustania Putri Desambo (2024)	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KSPPS PUTERI BERSERI SURAKARTA	Implementasi dari sistem pengendalian internal piutang dalam meminimalisir resiko piutang tak tertagih pada KSPPS Puteri Berseri Surakarta ini adalah dengan melakukan kegiatan jemput dana atau <i>collecting</i> untuk menghimpun dana,
			memperketat pemberian kredit dengan menerapkan analisis kelayakan kredit 5C, membuat prosedur pengajuan kredit serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional koperasi tersebut.
3	Alviana Farhatin Majidah (2022)	PERAN INTERNAL PIUTANG DALAM MENINGKATKAN KOLEKTABILITAS IURAN PESERTA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA	Pengendalian internal piutang berperan dalam peningkatan kolektibilitas iuran peserta pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pada kolektabilitas iuran di tahun 2020.

4	Evania Berly Mia Adelia Novitasari (2024)	ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENAGIHAN PIUTANG IURAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MADIUN	Penerapan sistem pengendalian internal penagihan piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Madiun masih diperlukan adanya perbaikan terutama pada sistem penguncian denda iuran agar angka piutang dapat dikendalikan.
5	Taufan A. Sanapati (2022)	ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA DALAM MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MEKARJAYA KAWANGKOAN	Penerapan sistem pengendalian internal piutang usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarjaya Kawangkoan sudah cukup efektif dilihat dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan kegiatan pemantauan. Namun berjalan kurang efektif pada unsur dan kegiatan pengendalian, dimana bagian yang melakukan analisis, pencarian calon nasabah dan penagihan adalah bagian yang sama.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka menjadi sebuah pijakan dalam merumuskan sebuah hipotesis atau pertanyaan untuk penelitian,serta dalam menentukan metode dan teknik analisis yang tepat untuk membangun suatu pemahaman yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.Maka dari itu,bentuk kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir